**PERJUANGAN PGRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU DI ERA REFORMASI (1999-2003) (STUDI KASUS PGRI DKI JAKARTA DAN DEPOK)**

**Syahrul Hidayat1, Hendriko Hidayat2, dst.**

Universitas Sanata Dharma

Email: syahrulhidayat123@gmail.com

***Abstract***

*The establishment of the Indonesian Teachers Association is the result of the struggle of Indonesian teachers. Judging from its historical journey, the struggle of the Teachers has started from the Dutch East Indies period. PGRI is a forum for teachers and education personnel to gather as a professional organization, struggle and workforce that always fights for teacher welfare, provides protection for teachers, and improves teacher human resources. As a forum for teachers' unity, PGRI is expected to have one of its objectives as a means of struggle in demanding teacher welfare, which is still a big homework for PGRI in all branches in Indonesia. The national education system law and the teachers and lecturers law have at least strengthened the role of this organization from the national, provincial, district and sub-district levels. With such a wide and numerous network, the PGRI organization has taken root in Indonesia. PGRI's struggle to improve teachers' welfare will be studied further, especially the case studies of PGRI DKI Jakarta and Depok.*

***Keywords:*** *PGRI, Teacher Welfare, DKI Jakarta, Depok*

**Abstrak**

Terbentuknya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia adalah hasil dari perjuangan guru-guru Indonesia. Dilihat dari perjalan sejarahnya, perjuangan kaum Guru telah dimulai dari masa Hindia Belanda. PGRI merupakan suatu wadah tempat berhimpunnya para guru- guru dan tenaga kependidikan sebagai organisasi profesi, perjuangan dan ketenaga kerjaan yang selalu memperjuangkan kesejahteraan guru, memberikan perlindungan terhadap guru, dan meningkatkan sumber daya manusia guru. Sebagai wadah persatuan guru, PGRI diharapkan salah satu tujuannya sebagai alat perjuangan dalam menuntut kesejahteraan guru yang masih menjadi PR besar dari PGRI di seluruh cabang di Indonesia. Dengan adanya undang - undang sistem pendidikan nasional dan undang – undang guru dan dosen setidaknya semakin menguatkan peran organisasi ini dari mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dengan jaringannya yang begitu luas dan banyak, menjadikan organisasi PGRI mengakar di Indonesia. Perjuangan PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan guru akan diteliti lebih lanjut khususnya studi kasus PGRI DKI Jakarta dan Depok.

**Kata kunci:** PGRI, Kesejahteraan Guru, DKI Jakarta, Depok

**PENDAHULUAN**

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), merupakan organisasi profesi guru terbesar di Indonesia. Seperti organisasi profesi lainnya, PGRI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang profesinya, serta melindungi hak dan kewajiban guru sebagai anggota profesi. Selanjutnya dikatakan bahwa organisasi profesi guru ini bahkan dimasa lampau pernah menjadi kendaraan politik, yang justru menggunakan nasib guru untuk meraih cita-cita golongan politik dominan tertentu. Peranan PGRI di masa mendatang diharapkan lebih proaktif dalam memperjuangkan nasib serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru (Fitriani, t.t . “Peranan PGRI Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Kecamatan Manggala Kota Makassar” Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM). Organisasi profesi ini diharapkan mampu menunjukkan citra sebagai motor penggerak dan wadah yang menampung semua aspirasi profesionalisme guru secara mandiri. Kualitas pendidikan yang rendah, akan berdampak menghambat program pembangunan peningkatan sumber daya manusia. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak PGRI guna menghasilkan sistem pendidikan yang baik dan bermutu.

Terbentuknya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia adalah hasil dari perjuangan guru-guru Indonesia. Dilihat dari perjalan sejarahnya, perjuangan kaum Guru telah dimulai dari masa Hindia Belanda dengan dibentuknya oraganisasi Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912. Persatuan Guru Hindia Belanda kemudian mengalami perubahan menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Pada tanggal 23-25 November 1945 diadakan kongres Guru, yang menghasilkan Persatuan Guru Republik Indonesia. Dalam situasi perjuangan rakyat melawan Sekutu, guru-guru mengadakan kongres yang dilaksankan dari tanggal 23 sampai 25 November 1945. Hasil kongres tersebut adalah guru-guru sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang bisa mewadahi aspirasi dan perjuangan guru untuk kemajuan bangsa Indonesia yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Perwujudan peran PGRI dalam mengupayakan kesejahteraan guru diantaranyanya melalui Undang – Undang Guru dan Dosen Sebagai Harapan Para Tenaga Pendidik.Wacana mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan guru memang telah menjadi isu publik sejak tahun 1980an, dengan berjalannya kondisi sosial pasca reformasi menguatkan kembali wacana tentang perlindungan terhadap ekonomi guru. Menguatnya wacana perlindungan guru juga dikemukakan oleh Moh. Surya selaku Ketua Umum PGRI setelah membaca hasil keputusan Kongres ke – 18 tahun 1998 yang mendesak pemerintah segera membuat UU perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dan juga menuntut pemerintah membuat UU tentang sistem penggajian guru dan tunjangan lainnya sesuai dengan harkat dan martabat guru, serta UU tentang sistem rekruitmen pendidikan, pengangkatan, penempatan dan pembinaan karier profesi guru (Hastantyo dkk, t.t: 16).

Pembahasan mengenai RUU perlindungan guru baru mulai diterima dan dibahas oleh lembaga legislatif yakni DPR dalam rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Mei 2005 yang dipimpin oleh Zainal Maarif sebagai Wakil Ketua DPR, dalam pembahasan itu muncul usulan inisiatif mengenai RUU tentang guru dan dosen yang output kedepannya guru dan dosen ditarik kembali sebagai pegawai pusat, bukan pegawai daerah, hingga pelaksaanaan UU Nomor 14 Tahun 2005 pada 30 Desember 2005, yang tertulis dari bagian kedua tentang hak dan kewajiban guru pada pasal 14 ayat 1 dinyatakan, memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, dan memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan (Hastantyo dkk, t.t: 16). Permasalahan mengenai kesejahteraan guru ini juga mewarnai PGRI cabang DKI Jakarta dan Depok. Oleh karena itu dalam kaitannya tersebut akan dibahas dalam penelitian ini tentang perjuangan PGRI DKI Jakarta dan Depok dalam meningkatkan kesejahteraan guru di era reformasi (1999-2003)

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan tentang perjuangan PGRI dalam mensejahterakan guru di DKI Jakarta dan Depok. Tahap-tahap yang dilalui adalah tahap heuristik (pengumpulan data), tahap kritik, tahap interpretasi dan historiografi (penulisan sejarah).

Tahap pertama yaitu heuristik, data-data dikumpulkan dari berbagai dokumen, surat kabar, majalah, buku, dan artikel. Pengumpulan data-data ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu cara dalam penelusuran data baik primer maupun sekunder dari suatu instansi tertentu yang terkait, dan atau hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai PGRI. Dalam penelitian ini akan dipergunakan sumber-sumber primer berupa arsip dan surat kabar yang sezaman serta beberapa wawancara dengan beberapa guru di Jakarta dan Depok. Di samping sumber-sumber primer, digunakan pula sumber sekunder. Sumber sekunder yang digunakan adalah buku dan majalah. Karya-karya dari sumber sekunder dapat membantu memberikan tambahan data dalam penelitian ini. Dari data-data yang terkumpul, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan, kemudian dilakukan pengujian melalui kritik untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertangungjawabkan. Kritik sumber ini merupakan langkah untuk memperoleh pemahaman mengenai validitas dari sumber yang didapat. Penulis akan melakukan pengujian silang antara buku yang satu dengan buku yang lain atau dengan sumber yang lain. Untuk menguji keaslian sumber yang diperoleh, antara lain dengan melakukan analisis sumber dan kritik teks terhadap dokumen yang didapat. Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik ekstern melalui kritik intrinsik, yaitu menentukan isi. Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yakni penafsiran terhadap data-data yang sudah diverifikasi sehingga menghasilkan fakta sejarah. Berbagai fakta yang diperoleh dirangkai dan dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan logis. Hasil dari tahap ini adalah kerangka penulisan sejarah yang jelas antara konteks waktu, tempat, dan peristiwa dari tema yang akan dibahas sebelum melangkah pada tahap berikutnya, yaitu penulisan sejarah. Dalam tahap terakhir ini, yaitu kerangka penulisan sejarah yang telah terbentuk kemudian disusun menjadi sebuah historiografi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Perjalanan PGRI Hingga Masa Orde Baru**

Dalam persekolahan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda dalam mencetak guru, guru pada zaman penjajahan, Belanda mendirikan sekolah guru seperti Kweekschool, Hogere Kweekschool (HKS), Hollands-Inlandse Kweekschool (HIK), dan sebagainya yang mana guru-guru dari tamatan sekolah mempunyai serikat sekerja masing-masing menurut ijazahnya (YPLP-PGRI Pusat, 1984: 19). Perbedaan penyelenggaraan sekolah untuk guru yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda menyebabkan perbedaan pula dalam hal gaji yang diterima oleh guru. Hal ini berakibat menimbulkan pertentangan antar golongan guru yang akhirnya memicu munculnya gerakan untuk memperjuangkan nasib para guru.

Dari perjuangan nasib seperti ini, para guru melihat adanya kekuatan perjuangan yang dilancarkan oleh para pekerja (buruh) lainnya dalam memperjuangan upah yang wajar, baik pekerja swasta maupun pemerintah. Seperti pada tahun 1908 lahirlah Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel in Nederlands Indie (VSTV), serta pada tahun 1912 disusul dengan lahirnya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB), tujuan dari pergerakan tersebut adalah memperjuangkan perbaikan nasib, perbaikan golongan serta posisi yang wajar dan adil.

Kilas balik dari sejarah organisasi PGRI memiliki rekam jejak yang sangat panjang dan memiliki pasang surutnya tersendiri, dari permasalahan- permasalahan di seputar dunia pendidikan pada umumnya dan kemakmuran para guru, pada khususnya yang menjadi salah satu fondasi dasar dari terbentuknya organisasi ini. Ketika masa kepemimpinan pemerintahan Indonesia di bawah Soekarno, periode tahun 1959—1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Puncak permasalahan dalam tubuh organisasi PGRI akibat pengaruh politik adalah Kongres ke-X di Jakarta, dimana pengurus yang berafiliasi politik paham komunis dan dekat dengan kekuasaan Presiden Soekarno saat itu, mendeklarasikan diri membentuk PGRI tandingan di luar kepemimpinan PGRI Kongres yang dipimpin oleh M.E. Subiyadinata. Kekuatan organisasi PGRI terletak pada anggota (http://kspi.or.id/pgri-dan-pemilu. Diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 01.55).

**2. Perjuangan PGRI Masa Reformasi**

Setelah era Orde Baru berakhir, Indonesia memasuki babak baru yaitu era Reformasi. Reformasi disuarakan secara terorganisir oleh komponen mahasiswa yang didukung kalangan akademisi dan komponen lainnya telah melayangkan banyak tuntutan terhadap pemerintah demi terciptanya Indonesia yang lebih baik (Gede Agung. 2014: 330).

Arus semangat reformasi melanda negeri. Perubahan situasi politik masa itu turut memengaruhi arah perjuangan organisasi. Di masa awal reformasi, PGRI menghadapi tantangan dalam lingkup global, nasional, dan organisasional. Tantangan global, khususnya di abad ke-21 yang ditandai dengan berbagai perubahan yang berlangsung cepat terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala dampaknya. Lingkungan yang sedang berubah secara global memerlukan pola kerja dalam bentuk kerja tim; memerlukan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); masyarakat lebih menghargai prestasi daripada status dan asal-usul; dan menghormati orang yang mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan produktif.

**B. Perjungan PGRI Dalam Mengangkat Kesejahteraan Guru**

Pada tahun 1999, PB PGRI telah melaksanakan advokasi kepada presiden BJ. Habibie dan DPR RI dalam memperjuangankan tambahan tunjangan penghasilan pegawai negeri dari pemerintah. Apa yang dilakukan dan diadvokasikan oleh PB PGRI telah membuahkan hasil dan pemerintah menerima usulan tambahan tunjangan kepada pegawai negeri sebesar seratus lima puluh ribu rupiah (Tim PB, 2008: xxii). Peralihan rezim seperti ini telah merubah atmosfir dalam lingkup pemerintahan RI ke arah yang lebih positif. Masyarakat Indonesia pada era ini tidak ragu-ragu untuk berpendapat. Ada suasana baru yang menunjukkan munculnya kebebasan pers, akademis, berorganisasi, dan lain sebagainya (Winters. 1999: 86).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru SMA Negeri di Jakarta yakni ibu Tini Suhartini yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.00, beliau menyatakan bahwa di era pemerintahan Orde Baru profesi guru kurang mendapatkan kesejahteraan dalam hal penghasilan dan tunjangan. Di era ini bahkan guru belum mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) di setiap perayaan hari besar agama. Kebanyakan guru mencari pekerjaan tambahan dan honor tambahan melalui pekerjaan sampingannya, seperti misalnya menjadi komite sekolah atau mengajar di tempat lain.

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Tini, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu guru di DKI Jakarta yakni Bapak Edi Sukmadi, guru SMA N 81 Jakarta menyatakan hal yang sama pula. Bahwa ketika beliau baru menjadi guru pada tahun 1996, 1 Wawancara dengan ibu Tini Suhartini seorang guru di SMAN 58 Jakarta Timur, tanggal 1 Agustus pukul 19.00. Setelah era reformasi bergulir, beliau menyatakan bahwa ada perbaikan terhadap nasib guru. Beliau yang juga menjadi anggota PGRI, menyatakan bahwa PGRI konsen terhadap pendidikan dengan memperjuangkan kesejahteraan guru. Pak Edi juga menyatakan bahwa guru lebih sejahtera karena ada program sertifikasi ini. Selanjutnya peningkatan kesejateraan guru juga diperoleh dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diberikan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang syarat di dalamnya untuk memperoleh TKD ini seorang guru harus tersertifikasi.

Adanya masukan dan peran dari PGRI akan berdampak pada pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa yang diperjuangkan bukan semata-mata untuk kepentingan guru di masa itu saja, melainkan akan berdampak juga pada kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Perjuangan yang dilakukan oleh PGRI Provinsi DKI Jakarta masih belum selesai karena target guru bersertifikat pendidik yang dicanangkan hingga tahun 2015 belum terpenuhi. Salah satu kendalanya adalah proses untuk mendapatkan sertifikat pendidik dirasa cukup sulit dan beberapa kali pemerintah mengganti cara perolehan sertifikat pendidik, hal inilah yang masih menjadi perjuangan yang terus dikawal dan disuarakan oleh PGRI Provinsi DKI Jakarta untuk guru-guru SMA di Jakarta.

**KESIMPULAN**

Sejarah PGRI diawal terbentuknya hingga perjuangannya sampai saat ini terus memperhatikan kepentingan guru terutama masalah kesejateraannya. Perjuangan PGRI sama hal nya berjuang untuk memajukan bangsa ini. Guru merupakan tonggak dari pendidikan dan sosok yang berada di garda terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena pentingnya peran guru tersebut, maka sesuatu yang terkait untuk kepentingan guru sejatinya sangat perlu diperhatikan. Perjuangan PGRI mengalami pasang surut sesuai dengan corak pemerintahan yang berlaku pada masanya. Ketika masa orde baru berdasarkan data, para guru mengatakan prefesi guru pada saat itu dipandang sebelah mata, disepelekan. Tingkat kesejahteraan tidak diperhatikan. Masa terus bergulir, ketika era reformasi tiba, di awal keberlangsungannya, masalah guru dan kesejateraannya belum langsung dipikirkan. Lambat laun dalam era ini, berdasarkan perjuangan PGRI yang menyuarakan ke pemerintah, sala satu hal yang diangkat yaitu masalah kesejateraan sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik dan semakin baik. Masalah kesejahteraan terus diperjuangkan dan dikawal oleh PGRI agar pelaksanaan pencairannya benar-benar terlaksana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bauer, J. C. 2003. Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison Of Attitudes in Germany and The United States. Dissertasions. University Of Cincinnati. Clermont.

Cohen, Bruce J. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Gede Agung, Dewa Agung. 2014. Prosiding: Seminar Nasional Pembelajaran Sejarah Di Tengah Perubahan. Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Malang. Malang.

Gottschalk, Louis. 2006. Mengerti Sejarah diterjemahkan oleh Nugrogo Notosusanto. Jakarta: UI Press.

Hadiatmadja, R.A. Soepardi., dkk., 2000. Pedidikan Sejarah Perjuangan PGRI

(PSPPGRI), Jilid II, III, IV, V. Semarang: IKIP PGRI.

Kunandar. 2011. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Press.

Kuntowijoyo. 1995 . Pengantar Ilmu Sosial. Cetakan 1. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Kuntowijoyo. 1995 . Pengantar Ilmu Sosial. Cetakan 1. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

. 2006. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana.

. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kompas. 2002. Indonesia Dalam Krisis 1997-2002. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Lioyd, Christopher. 1986. Explanation in Social History. Thomes J Bata Library Trent University

Navis, A.A. 1996. Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei Ruang Pendidik INS Kayutanam. Jakarta: IKAPI.

PGRI. t.t. PGRI Dari Masa Ke Masa. Jakarta: YPLP PGRI Pusat

PB PGRI. 2008. Seratus Tahun Perjuangan Guru Indonesia. Jakarta: PB PGRI.

. 2019. Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor V/KONGRES/XXII/PGRI/2019 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bab. IV pasal 4.

. 2020. Sejarah Singkat Persatuan Guru Republik Indonesia.

Prawiro, Radius .1998. Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme Dalam Aksi. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Ricklefs, M.C. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200–2004. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.

Subagia, dkk. 2008. Seratus Tahun Perjuangan Guru Indonesia. Jakarta: PB PGRI dan Departemen Pendidikan Nasional.

Sedyawati, Edi, dkk. 1991. Sejarah Pendidikan di Indonesia Seblum Kedatangan bangsa-bangsa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

Setijadi. 1999. Cakrawala Pendidikan. Jakarta: Universitas Terbuka. Soekanto. 2001. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.

Suparlan. 2005. Menjadi Guru Efektif, Yogyakarta, Hikayat, cetakan I.

Supriadi, Dedi. 2003. Guru di Indonesia: Penidikan, Pelatihan, dan Perjuangannya sejak Zaman Kolonial hingga Era Reformasi. Jakarta: Depdikbud.

Sutarto. 2009. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGM Press.

Winters, A Jeffrey. 1999. Dosa-dosa Politik Orde Baru. Jakarta: Djambatan. Yunus, M Rusli, dkk. 2003. Perjalanan PGRI (1945—2003) Menyongsong

Kongres XIX PGRI di Semarang 8—12 Juli 2003. Jakarta: Pengurus Besar PGRI dan Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah , Departemen Pendidikan Nasional.

YPLP-PGRI Pusat. (1984). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari Masa ke Masa. Jakarta: PGRI Pusat.

Fitriani. t.t. “Peranan PGRI Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Kecamatan Manggala Kota Makassar”. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM

Hastantyo, Gusseno., FX Wartoyo dan Yudi Prasetyo. t.t. Pasang Surut Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pasca Reformasi Tahun 1998 – 2005 Di Jawa Timur. Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sidoarjo.

Kosasih, Ahmad. 2016. “Perjuangan Organisasi Guru Di Masa Revolusi Sejarah PGRI Di Awal Pendiriannya”. Jurnal Sosio-E-Kons. Vol. 8. No. 2.

Murwaningsih, Tri. “Peranan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru”. Jurnal llmiah Guru COPE, No. 0l/Tahun VIII/Februari 2004.

Syahri, M. Alfi. 2018. Peran Dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Vol. 3. Pp. 7.

Tedjasukmana, Iskandar. 2008. Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia terjemahan Oey Hay Djoen). Ithaca: Seri Modern Indonesia Project Southeast Asia Pogram Department of Far Eastern Studies Cornell University.

Budiarto. 2009. “Peranan PGRI Sebagai Kelompok Kepentingan (Interest Groups) Dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Guru (Studi Kasus Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2004 s/d 2009)”. Universitas Diponegoro.

BSNP. 2010. Paradigm aPendidikan Nasional Abad XXI. [Online]. Tersedia: http://www.bsnpindonesia.org/id/wpcontent/uploads /2012/04/Laporan-

BSNP-2010.pdf diakses pada tanggal 5 Juli 2021 Pukul 16.59

https://core.ac.uk/download/pdf/34212134.pdf diakses pada 5 Juli 2021 pukul 10.09

http://kbbi.web.id/sejahtera diakses pada 5 Juli 2021 pukul 02.27

http://kspi.or.id/pgri-dan-pemilu. Diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 01.55

Muchariman, Randi. 2019. “The Power of Languages in Indonesia Reformation”. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. 4(1). Diakses melalui https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.13698 pada 05 Juli 2021 pukul 15.43

https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/c585f6b3-4b0a-412b-a0ab- 7ad264a6c4aa diakses pada 2 Agustus 2021 pukul 16.00.

https://setagu.net/tabel-perubahan-tkd-dki-jakarta/ diakses pada 2 Agustus 2021 pukul 17.00.

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4892/pp-no-74-tahun-2008 diakses pada 2 Agustus 2021 pukul 17.00.

Wawancara dengan ibu Tini Suhartini seorang guru di SMAN 58 Jakarta Timur, tanggal 1 Agustus pukul 19.00

Wawancara dengan Bapak Edi Sukmadi seorang guru di SMAN 81 Jakarta Timur, tanggal 1 Agustus pukul 20.00

Wawancara dengan Bapak Santoso, S.E., M.Pd dari Sekolah Tadika Pertiwi Depok

Wawancara dengan Bapak Supandi, S.Ag dari Sekolah Bunda Kandung Jakarta